



>>>>>>>>

STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

> >>>>>>>>



>>>>>>>>

STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2019



Statistik Politik

Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019

ISBN : 978-602-1059-30-2
No. Publikasi : 52520.2012
Katalog BPS : 4601003.52

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desain Tata Letak:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019
xii+ 48 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Penyusun

Pengarah :

Suntono, SE, M.Si

Koordinator Teknis :

Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si

Naskah :

Yati Daryati Nurmalasari, S.ST

Pengolah Data :

Yati Daryati Nurmalasari, S.ST

Gambar Kulit :

Ayub Abdul Rahman, S.ST

Penyunting :

Amy Wardian Pratama, S.ST

Isna Zuriatina, S.ST, MT

Ratna Asih Wulandari, S.ST, M.Ak

Ayub Abdul Rahman, S.ST

Kata Pengantar

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi NTB) berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas BPS untuk penyediaan dan publisitas data beragam dan berkualitas merupakan hal yang tak terelakkan lagi dimasa mendatang, sehingga BPS berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan data terkait gambaran umum politik di NTB. Data-data yang disajikan bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Bakesbangpoldagri, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan data-data tahun 2019 seperti tingkat partisipasi politik, produk perundangan, demokrasi, dan sebagainya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data, publikasi statistik Politik akan terus mengalami penyempurnaan, baik struktur maupun muatan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Mataram, September 2020
**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
K e p a l a,

SUNTONO



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://htb.bps.go.id>

Abstraksi

Pesta demokrasi merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil pemilu legislatif dan pemilukada yang terakhir dilaksanakan. Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan dan Bintang (PBB), Partai Berkarya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu legislatif di tingkat provinsi sebanyak 3.667.253 jiwa, 82,75 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 17,25 persen golput.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada Tahun 2019 sebanyak 14, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 16 perda. Dari 14 jumlah perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTB selama Tahun 2019, 3 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sampai Tahun 2019 sebanyak 344.



Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Nusa Tenggara Barat. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Pada Tahun 2019, IDI NTB mencapai momen tertingginya sebesar 76,64 naik 3,01 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2018 yang sebesar 73,63. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di NTB berada pada kategori sedang. Dari data IDI 2019 diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapatkan perhatian lebih, diantaranya variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan berpendapat dan variabel pemilu yang bebas dan adil.



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Abstraksi	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II. Metodologi.....	5
2.1 Jenis dan Sumber Data	5
2.2 Konsep dan Definisi.....	5
BAB III. Gambaran Umum Provinsi NTB.....	9
BAB IV. Gambaran Umum Politik NTB	11
4.1 Pemilu Legislatif Terakhir.....	11
4.2 Peran DPRD.....	12
4.3 Pemilihan Kepala Daerah Terakhir	14
4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM	18
4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB.....	20
TABEL-TABEL	27



Daftar Gambar

Gambar 4.1	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2019.....	13
Gambar 4.2	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2018-2019.....	14
Gambar 4.3	Persentase Pemilih dalam Pemilu pada Terakhir menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di NTB.....	17
Gambar 4.4	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019.....	19
Gambar 4.5	Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 - 2019...	22
Gambar 4.6	Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil NTB, 2009 - 2019.....	24
Gambar 4.7	Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik NTB, 2009 - 2019.....	25
Gambar 4.8	Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi NTB, 2009 - 2019.....	25



Daftar Tabel

Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di NTB Tahun 2019.....	29
Tabel 2.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.....	30
Tabel 3.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.....	31
Tabel 4.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.....	32
Tabel 5.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.....	33
Tabel 6.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.....	34
Tabel 7.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2019	35
Tabel 8.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2019.....	36
Tabel 9.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.....	37
Tabel 10.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.....	38
Tabel 11.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2019.....	39



Tabel 12.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2019.....	40
Tabel 13.	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat.....	41
Tabel 14.	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat.....	42
Tabel 15.	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat.....	43
Tabel 16.	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat.....	44
Tabel 17.	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat.....	45
Tabel 18.	Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2019.....	46
Tabel 19.	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar dan Total Terdaftar di NTB Tahun 2019.....	47
Tabel 20.	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2018-2019.....	48



BAB I.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas situasi politik akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Ketika reformasi 1998 bergulir dan mengakhiri masa orde baru, situasi politik nasional pun mengalami tuntutan serupa untuk berubah dan berbenah. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang sebelumnya berjalan tersentral di pusat pada masa orde baru, perlahan mengalami perubahan untuk mengakomodir tuntutan reformasi. Tuntutan pendistribusian kekuasaan tersebut terjadi dalam 2 level, horizontal dan vertikal. Di level horizontal, lembaga-lembaga negara diluar eksekutif diperkuat agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di level vertikal, adanya pemberlakuan otonomi daerah yang mendelegasikan berbagai kewenangan yang sebelumnya merupakan otoritas pusat sehingga bisa dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan situasi politik tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai kepentingan dalam masyarakat



diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya, diantaranya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik di daerah. Secara umum, partai-partai politik yang bermunculan di daerah merupakan kepanjangan dari parpol di pusat.

Selain itu, perubahan budaya politik yang semakin terbuka juga menjadi aspek yang penting. Media cetak ataupun elektronik menjadi leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat baru bermunculan sebagai wadah masyarakat menyampaikan kepentingannya. Kebebasan menyalurkan pendapat dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik.

Diantara isu penting yang muncul adalah tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 ketentuan kuota minimal 30 % perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem zipper (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbang, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan



rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di NTB. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi politik masyarakat NTB. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik hasil pemilukada terakhir di Kabupaten/kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan politik dan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan demokrasi di NTB.



1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik Provinsi NTB 2019 menyajikan gambaran politik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di wilayah NTB.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tiga bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menjelaskan gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab terakhir adalah menyajikan gambaran umum politik (Bab IV).



BAB II. Metodologi

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari hasil proyeksi penduduk, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Bakesbangpoldagri, dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikumpulkan melalui Survei Politik dan Keamanan.

2.2 Konsep dan Definisi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.



Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

Golongan Putih

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.



Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Pemilih

Pemilih adalah warga Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah kawin (Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2008)

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi 2, konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta non konvensional seperti demonstrasi dan mogok.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://htb.bps.go.id/>

BAB III.

Gambaran Umum Provinsi NTB

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada 115^o46' – 119^o5' Bujur Timur dan 8^o10' – 9^o5' Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.164,84 km², terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 117



kecamatan dan 1.143 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.208.594 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 152.437 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,59 juta jiwa atau sekitar 69,97 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,54 juta jiwa atau 30,03 persen dari jumlah penduduk NTB.



BAB IV.

Gambaran Umum Politik NTB

4.1 Pemilu Legislatif Terakhir

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di NTB. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat NTB. Di tingkat provinsi, hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan dan Bintang (PBB), Partai Berkarya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Tabel 3-12 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan kabupaten/kota di NTB Tahun 2019. Dalam tabel-tabel tersebut tampak bahwa jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten/kota berkisar antara 10 sampai dengan 12 partai. Kabupaten/kota di Pulau Lombok dikuasai oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).



Partai Golkar memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, sedangkan Partai Demokrat memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Di Pulau Sumbawa, semua pemilu legislatif dimenangi oleh PAN kecuali di Kabupaten Sumbawa.

Dua kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing anggota sebanyak 50 orang. Dari keterwakilan perempuan di legislatif, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang semua kursinya diisi oleh laki-laki.

4.2 Peran DPRD

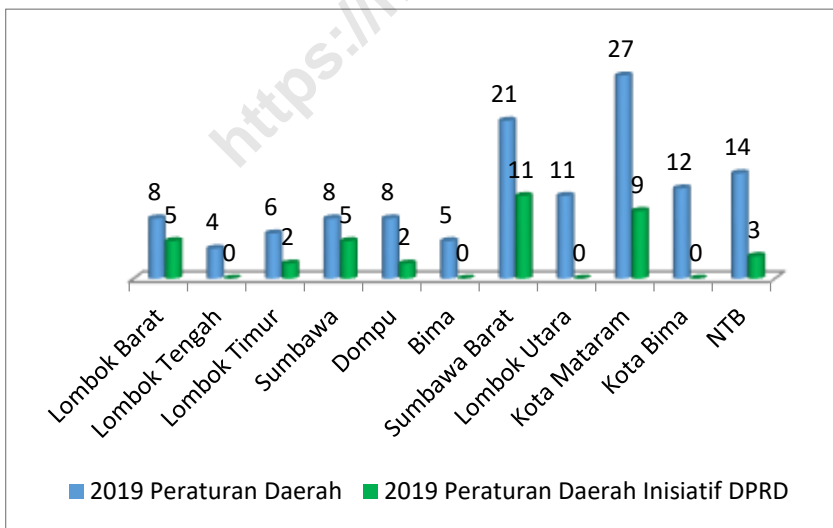
DPRD memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Salah satu peran DPRD adalah menyusun peraturan daerah (perda) baik berdasarkan usulan pihak eksekutif maupun yang diinisiasikan oleh DPRD. Pada Tahun 2019 DPRD Provinsi NTB menghasilkan perda sebanyak 14 buah. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan inisiasi dari DPRD (inisiatif DPRD).

Selama Tahun 2019, peraturan daerah paling banyak dihasilkan oleh DPRD Kota Mataram, yaitu sebanyak 27 perda. Sedangkan yang



paling sedikit menghasilkan peraturan daerah adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebanyak 4 perda. Jumlah perda yang banyak dihasilkan oleh suatu daerah tidak dapat menjadi ukuran telah dijalankannya fungsi legislasi DPRD dengan baik, akan tetapi harus dilihat juga kualitas dari perda yang dihasilkan tersebut. Apabila dilihat dari jumlah perda yang merupakan inisiatif DPRD, DPRD di semua kabupaten/kota yang ada di NTB dipandang belum memuaskan publik. Hal ini dikarenakan rendahnya inisiatif pembuatan perda yang disahkan, bahkan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Bima, dari perda-perda yang dihasilkan tidak ada yang merupakan inisiatif dari DPRD.

Gambar 4.1
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019

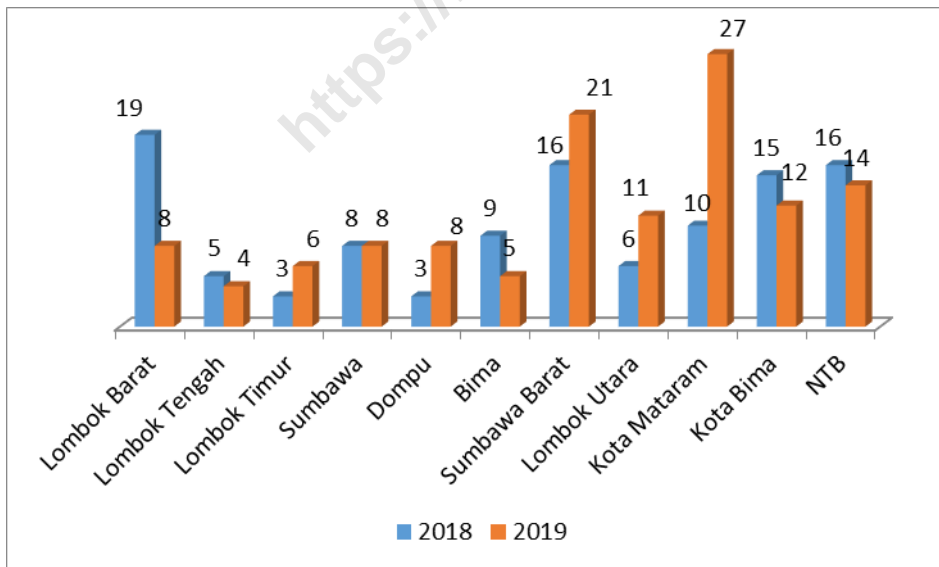


Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan



Sepanjang tahun 2018-2019, jumlah perda yang dihasilkan di kabupaten/kota yang ada di NTB cenderung meningkat. Walaupun ada empat kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah perda yang dihasilkan selama 2018-2019, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Peningkatan paling tinggi jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD selama tahun 2018-2019 terjadi di Kota Mataram. Jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Mataram meningkat dari 10 perda pada tahun 2018 menjadi 27 perda pada Tahun 2019. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas terhadap perda yang dihasilkan tersebut.

Gambar 4.2
Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2018-2019



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan



4.3 Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Dinamika aturan bernegara menyebabkan istilah-istilah politik terkait penyelenggaraan pemilu di daerah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Pilkada di bawah era Otonomi Daerah terkait penyelesaian sengketa ada di Mahkamah Agung (MA). Kemudian muncul UU yang baru nomor 22 tahun 2007, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu sehingga disebut Pemilukada. Penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tahun 2011 terbit undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang itu tidak lagi disebut Pemilukada tetapi disebut dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota. Hal itu sesuai dengan UUD yang menyebutkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur, walikota atau bupati.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya



Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

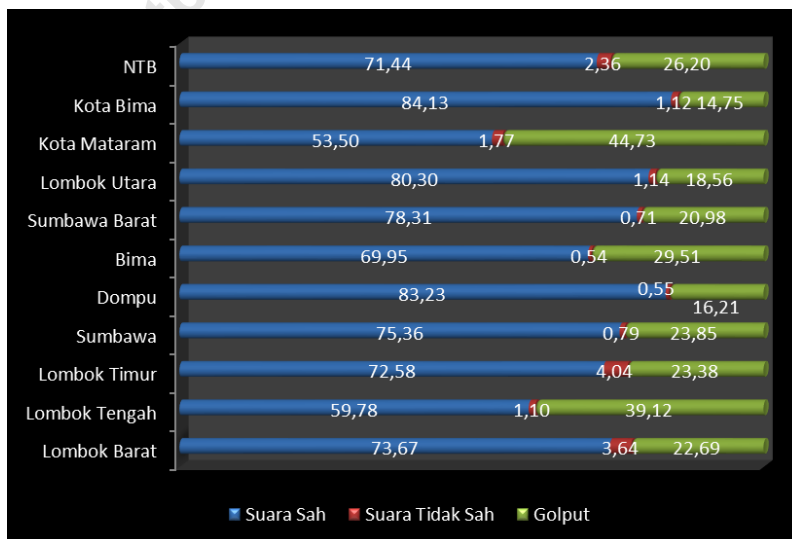
Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.



Tabel 13 sampai dengan tabel 17 menyajikan data tentang pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih, jumlah pasangan calon, dan karakteristik pasangan terpilih pada pilkada tingkat kabupaten/kota terakhir di NTB. Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 27 Juni 2018 (bersamaan dengan Pemilihan Gubernur terakhir). Di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram pilkada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2015.

Gambar 4.3
Persentase Pemilih dalam Pemilu Terakhir Menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan



Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah daftar pemilih terbesar, lebih dari 84 persen ada di Kota Bima dalam pemilukada di Tahun 2018. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di Kota Bima sudah cukup baik. Kota Mataram merupakan wilayah dengan persentase suara sah terhadap daftar pemilih terendah dibanding kabupaten/kota lain se-NTB dengan besaran 53 persen.

Pemilukada yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah diikuti oleh 5 pasangan calon (paslon), terbanyak diantara pemilukada di kabupaten/kota lainnya. Semua kepala daerah yang terpilih di pemilukada di wilayah NTB adalah laki-laki kecuali di Kabupaten Bima. Selain sebagai satu-satunya kepala daerah perempuan di wilayah NTB, usia saat terpilihnya juga yang termuda diantara kepala daerah yang lain.

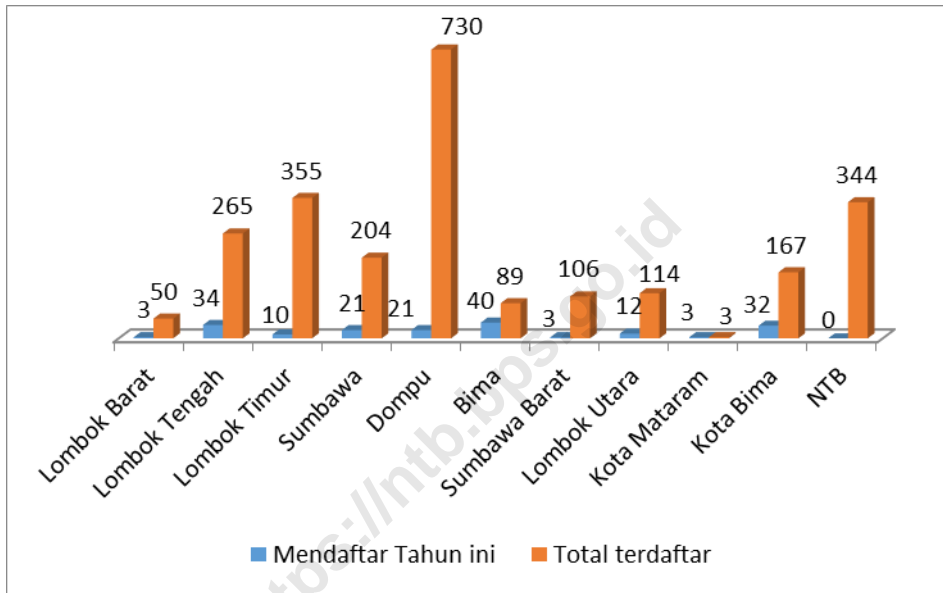
4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Ormas dan LSM ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah ormas dan LSM di NTB meningkat, saat ini ada setidaknya 2000 ormas atau LSM yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pada Tahun 2019 tidak ada ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri



Provinsi NTB, sedangkan total yang terdaftar sampai Tahun 2019 sebanyak 344.

Gambar 4.4
Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Berdasarkan Gambar 4.4, perkembangan jumlah ormas atau LSM yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya pada tingkat provinsi saja melainkan juga pada tingkat kabupaten/kota. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah ormas atau LSM ini antara lain karena perkembangan di bidang politik, demokrasi, perkembangan ekonomi dan teknologi. Kabupaten Dompu merupakan kabupaten yang memiliki ormas atau LSM terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 730, dimana 21 ormas atau LSM mendaftarkan pada Tahun 2019 di Bakesbangpoldagri. Ormas atau



LSM akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Freedom House melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.



Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011 dan seterusnya. Metode

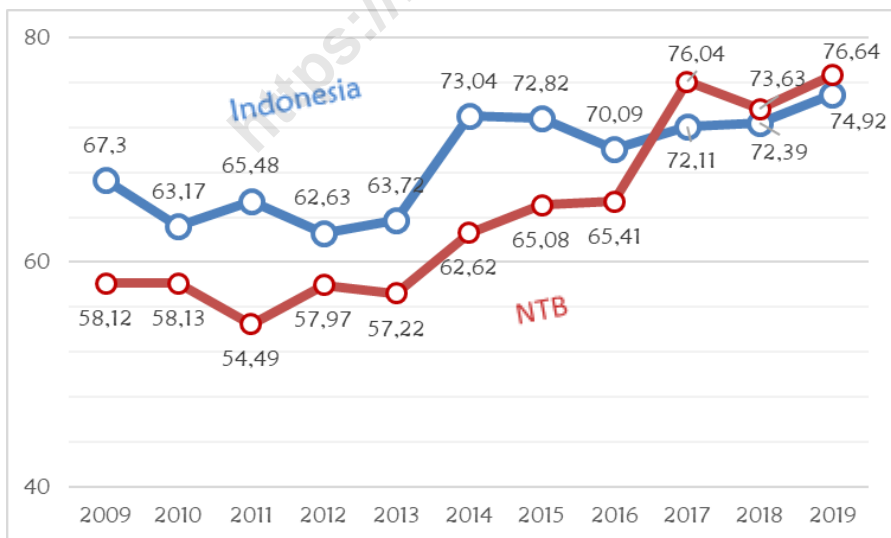


pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

5

Potret demokrasi di NTB dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini sangat tergantung pada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Tahun 2019 IDI NTB memiliki nilai 76,64, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 73,63. Nilai ini dapat dikategorikan sedang karena nilai IDI berkisar 0 – 100. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni ‘rendah’ (indeks < 60), ‘sedang’ (indeks 60 – 80), dan ‘tinggi’ (indeks >80).

Gambar 4.5
Perkembangan Indeks Demokrasi NTB dan Nasional, 2009 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik



Kinerja demokrasi yang semakin membaik bukanlah hanya berasal dari kinerja pemerintah semata, tetapi juga peran serta masyarakat dalam berdemokrasi. IDI diukur dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil menyoroti hal-hal yang terkait adanya kejadian/tindakan dari aparat pemerintah atau masyarakat yang membatasi kebebasan masyarakat untuk berkumpul/berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, atau kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik mencakup hak memilih dan dipilih serta hak partisipasi politik. Aspek ini menyoroti kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat dihambat, pengaduan/keluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, serta demonstrasi yang bersifat anarkis. Aspek lembaga demokrasi menyoroti peran dari lembaga-lembaga demokrasi seperti peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peran peradilan yang independen.

Apabila dilihat lebih mendalam, peningkatan nilai IDI selama kurun waktu 2018-2019 disebabkan oleh meningkatnya nilai variabel penyusun IDI. Terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan tiga variabel yang mengalami penurunan. Variabel-variabel yang mengalami penurunan diantaranya adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan berpendapat dan variabel pemilu yang bebas dan adil. Variabel ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar kinerja demokrasi di NTB semakin membaik.

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 78,36; aspek hak-hak politik sebesar 66,14; dan aspek lembaga demokrasi

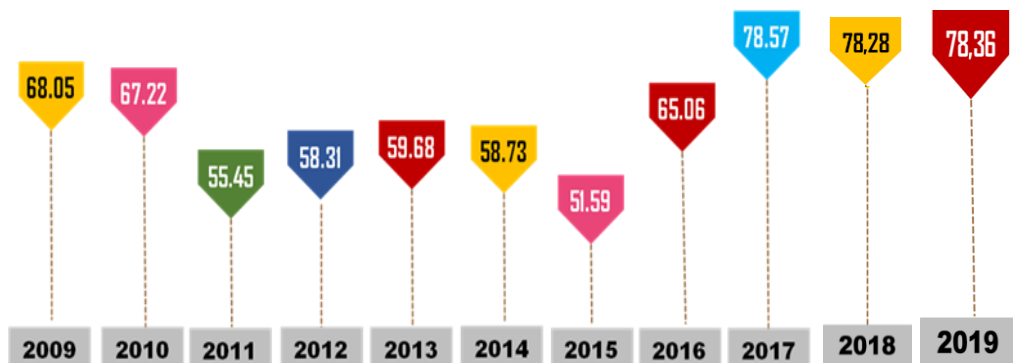


sebesar 91,16. Secara lebih rinci, pada 2019 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 0,08 poin, 4,06 poin, dan 5,05 poin.

Perkembangan aspek IDI selama kurun waktu 2009-2019 mengalami fluktuasi. Aspek kebebasan sipil berfluktuasi dan mengalami kenaikan di Tahun 2019. Aspek hak-hak politik merupakan aspek dengan nilai paling rendah dan mulai mengalami peningkatan. Aspek lembaga demokrasi juga berfluktuasi dan mengalami kenaikan di Tahun 2019.

Berbeda dengan tahun 2015, sejak tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Tahun 2019, untuk indeks aspek Kebebasan Sipil tetap berada di kategori “sedang”. Indeks aspek Hak-Hak Politik juga tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Lembaga Demokrasi berada pada kategori “baik”.

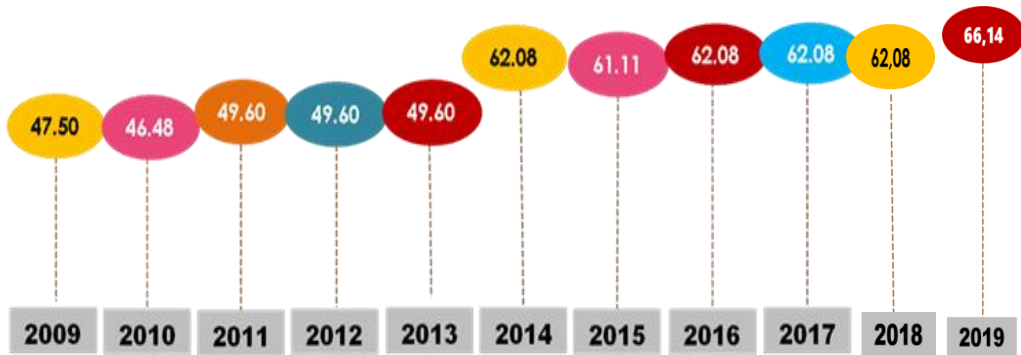
Grafik 4.6
Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil NTB, 2009-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

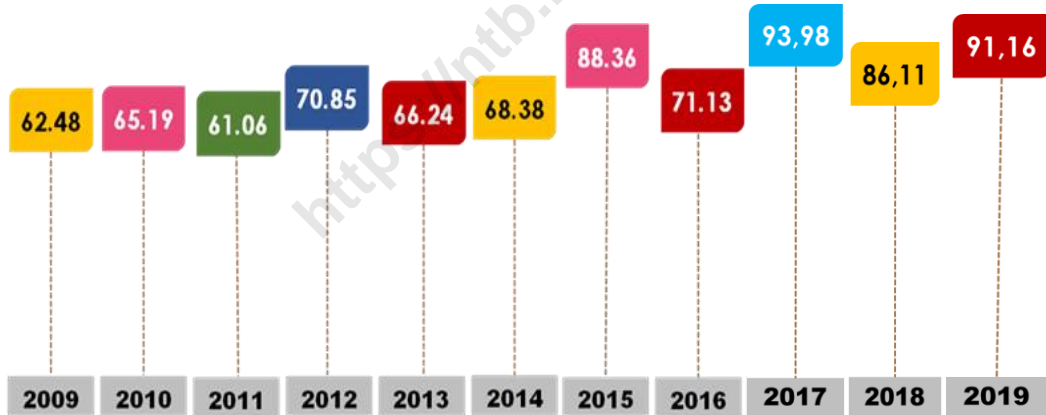


Grafik 4.7
Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik NTB, 2009-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4.8
Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi NTB, 2009-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam IDI, khusus untuk variabel hak memilih dan dipilih dilakukan pengukuran setiap 5 tahun sekali karena terdiri dari indikator jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas



sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*), jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, dan jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Indikator-indikator tersebut akan menentukan perkembangan nilai IDI sehingga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan.





*TABEL-
TABEL*



Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	1.053,87	10	122	704.586
Lombok Tengah	1.208,39	12	139	955.411
Lombok Timur	1.605,55	21	254	1.208.594
Sumbawa	6.643,98	24	166	461.502
D o m p u	2.321,55	8	81	255.569
B i m a	4.389,40	18	192	493.198
Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	152.437
Lombok Utara	809,53	5	33	222.212
Kota Mataram	61,30	6	50	495.681
Kota Bima	222,25	5	41	176.432
Nusa Tenggara Barat	20.164,84	117	1.143	5.125.622

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020



Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golkar	9	1	10
Partai Gerindra	9	0	9
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	0	7
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	0	7
Partai Demokrat	7	0	7
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	0	6
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Nasdem	5	0	5
PDI Perjuangan	4	0	4
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0	2
Partai Berkarya	2	0	2
Partai Hanura	1	0	1
Jumlah	64	1	65

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	0	5
Partai Gerindra	3	1	4
PDI Perjuangan	4	0	4
Partai Golkar	5	1	6
Partai Nasdem	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	0	4
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	0	4
Partai Demokrat	3	0	3
Partai Hanura	1	2	3
PKPI	1	0	1
Jumlah	38	6	44

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	8	1	9
Partai Demokrat	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	1	6
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	2	0	2
Partai Gerindra	5	1	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	1	5
Partai Bulan Bintang (PBB)	4	0	4
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	46	4	50

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 5. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	7	0	7
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4	1	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	2	2	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	1	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	46	4	50

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 6. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan (PDIP)	6	0	6
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6	0	6
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	0	5
Partai Pembangunan Persatuan (PPP)	5	0	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Demokrat	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
PKPI	1	0	1
PBB	1	0	1
Jumlah	44	1	45

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
PDI Perjuangan (PDIP)	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	0	3
Partai Gerindra	3	0	3
Partai Demokrat	2	0	2
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	0	2
Jumlah	26	3	29

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 8. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	6	1	7
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6	0	6
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Gerindra	4	0	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2
Jumlah	39	6	45

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 9. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
PDI Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	0	2
Partai Gerindra	3	0	3
Partai Demokrat	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	0	2
Jumlah	25	0	25

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 10. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	5	0	5
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	0	4
Partai Gerindra	3	0	3
PDI Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	0	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	30	0	30

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7	2	9
Partai Gerindra	5	1	6
PDI Perjuangan (PDIP)	5	0	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	0	5
Partai Demokrat	3	1	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	0	2
Partai Amanat Nasional (PAN)	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	0	1
Jumlah	36	4	40

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 12. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	0	4
Partai Gerindra	3	0	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	0	3
PDI Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0	2
Partai Demokrat	1	1	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	0	1	1
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	0	1	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	0	1
Jumlah	22	3	25

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 13. Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lombok Barat	475.574	350.339	17.305	107.930
Lombok Tengah	766.806	458.421	8.411	299.974
Lombok Timur	892.701	647.960	36.095	208.646
Sumbawa	325.703	245.441	2.576	77.686
D o m p u	162.516	135.266	899	26.351
B i m a	375.360	262.549	2.045	110.766
Sumbawa Barat	91.950	72.003	653	19.294
Lombok Utara	159.007	127.680	1.809	29.518
Kota Mataram	297.024	158.913	5.250	132.861
Kota Bima	104.953	88.300	1.180	15.473
Nusa Tenggara Barat	3.574.214	2.553.602	84.361	936.251

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat



Tabel 14. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	27 Juni 2018	3
Lombok Tengah	9 Desember 2015	5
Lombok Timur	27 Juni 2018	4
Sumbawa	9 Desember 2015	3
D o m p u	9 Desember 2015	4
B i m a	15 Desember 2015	4
Sumbawa Barat	9 Desember 2015	3
Lombok Utara	9 Desember 2015	2
Kota Mataram	9 Desember 2015	2
Kota Bima	27 Juni 2018	3
Nusa Tenggara Barat	27 Juni 2018	4

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat



Tabel 15. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Terakhir Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Sah	% Suara Sah Terhadap Jumlah Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	475.574	350.339	73,67
Lombok Tengah	766.806	458.421	59,78
Lombok Timur	892.701	647.960	72,58
Sumbawa	325.703	245.441	75,36
D o m p u	162.516	135.266	83,23
B i m a	375.360	262.549	69,95
Sumbawa Barat	91.950	72.003	78,31
Lombok Utara	159.007	127.680	80,30
Kota Mataram	297.024	158.913	53,50
Kota Bima	104.953	88.300	84,13
Nusa Tenggara Barat	3.574.214	2.553.602	71,45

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat



Tabel 16. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	160.441	45,80	Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP
Lombok Tengah	460.468	46,34	PKS dan Gerindra
Lombok Timur	271.559	41,91	PDIP, Hanura, Golkar, PPP, PBB, Nasdem, PKPI
Sumbawa	117.458	47,86	Demokrat-PDIP
D o m p u	49.979	36,74	Gerindra, Nasdem, Hanura
B i m a	105.506	40,12	Golkar, Hanura, Gerindra
Sumbawa Barat	30.732	42,68	PDIP, PBB, PKS, PKPI, Nasdem, PKB
Lombok Utara	68.335	52,75	Gerindra, PDIP, PKB, PKS, PPP
Kota Mataram	159.348	77,27	PKS, PKB, Hanura, PAN, PKPI, Nasdem
Kota Bima	39.006	44,17	Nasdem, Gerindra, PAN, Golkar, PKB, Hanura, PBB, PKPI dan PPP
Nusa Tenggara Barat	811.945	31,80	PKS dan Demokrat

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat



Tabel 17. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	Laki-laki	S-2	47	Bupati Lobar
Lombok Tengah	Laki-laki	S-1	49	Bupati
Lombok Timur	Laki-laki	S-1	61	Wiraswasta
Sumbawa	Laki-laki	D-III	61	Anggota DPRD Prov NTB
D o m p u	Laki-laki	S-1	51	Bupati
B i m a	Perempuan	Paket C	36	Wakil Ketua DPRD
Sumbawa Barat	Laki-laki	S-3	52	Sekretaris Daerah KSB
Lombok Utara	Laki-laki	S-3	44	Wakil Bupati
Kota Mataram	Laki-laki	SMA	55	Walikota
Kota Bima	Laki-laki	S-1	47	Anggota DPR RI
Nusa Tenggara Barat	Laki-laki	S-3	46	Anggota DPR RI

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat



Tabel 18. Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	8	5
Lombok Tengah	4	0
Lombok Timur	6	2
Sumbawa	8	5
D o m p u	8	2
B i m a	5	0
Sumbawa Barat	21	11
Lombok Utara	11	0
Kota Mataram	27	9
Kota Bima	12	0
Nusa Tenggara Barat	14	3

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 19. Jumlah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendaftar dan Total Terdaftar di NTB Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Ormas/LSM yang Mendaftar Tahun Ini	Total Ormas/LSM Terdaftar
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	3	50
Lombok Tengah	34	265
Lombok Timur	10	355
Sumbawa	21	204
D o m p u	21	730
B i m a	40	89
Sumbawa Barat	3	106
Lombok Utara	12	114
Kota Mataram	3	3
Kota Bima	32	167
Nusa Tenggara Barat	0	344

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2019



Tabel 20. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2018-2019

Nama Variabel	2018	2019	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	96,88	-3,12
Kebebasan Berpendapat	100,00	91,65	-8,35
Kebebasan Berkeyakinan	62,81	64,73	1,92
Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00	0,00
Hak Memilih dan Dipilih	74,17	75,76	1,59
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	56,52	6,52
Pemilu yang Bebas dan Adil	100,00	85,47	-14,53
Peran DPRD	71,88	84,05	12,17
Peran Partai Politik	87,14	100,00	12,86
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	74,40	84,65	10,25
Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik





Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<https://intibps-bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram

Telp. (0370) 621385 ; Fax: (0370) 623801